

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TOILI BARAT

Trisna Firmansyah¹, Andi Famrizal², Paryati³.

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email.Korespondensi. trisna@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian di laksanakan di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Pengambilan informan mempergunakan purposive yaitu dengan menetapkan 5 orang sebagai informan. Guna memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi. Analisis data yang di lakukan menggunakan Teknik analisis Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kriteria komunikasi, terlihat bahwa implementasi PKH telah tercapai sebagai mana mestinya karna telah terjalin komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. kreteria sumberdaya manusia terlihat bahwa pendamping PKH sudah sangat memadai dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan ini. kreteria disposisi, terlihat bahwa sejauh ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karna sikap yg di miliki pendamping PKH belum memadai sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. kreteria struktur birokrasi, pelaksana program PKH sudah berjalan sesuai apa yg di harakan oleh pembuat kebijakan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Banggai.

Kata Kunci, Implementasi, PKH

ABSTRACT

The research was conducted in West Toili District, Banggai Regency. Informant selection was conducted purposively, selecting five informants. To obtain the data needed for this study, the researchers used the following data collection methods: 1. Observation 2. Interviews 3. Documentation. Qualitative analysis techniques were used for data analysis.

The results of this study indicate that, based on the communication criteria, the implementation of the Family Hope Program (PKH) has been achieved as intended due to good communication between policy implementers and recipients. Based on the human resources criteria, PKH facilitators have been very effective in implementing the Family Hope Program (PKH). Based on the disposition criteria, it appears that the program has not been fully implemented because the attitudes of PKH facilitators have not yet met the expectations of policymakers. Based on the bureaucratic structure criteria, the implementation of the PKH program has been running according to the expectations of policymakers, namely the Banggai Regency Social Service.

Keywords: Implementation, PKH

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan menuju kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan hanya masalah di negara berkembang dan terbelakang melainkan juga di alami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak banyak.

Kemiskinan menjadi indikator penentu dalam peningkatan pembaguan suatu daerah, terlebih bagi Kabupaten Banggai. Sesuai dengan data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai sebanyak 7,39 jiwa pada tahun 2020 sedangkan Kecamatan Toili Barat jumlah penduduk miskin sebanyak 452 jiwa di tahun 2020.

Guna menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya masalah kemiskinan, maka pemerintah melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Banggai.

Salah satu program khusus dalam bentuk kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka mempercepat menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ini

menunjukkan adanya eksistensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Dasril (2017) menyatakan eksistensi pemerintah sebagai organisasi publik dan administrator publik dalam kegiatannya mempunyai tanggung jawab kepada publiknya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah dituntut untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat

Program ini di laksanakan oleh Dinas Sosial yang salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial. Sebagai salah satu program yang di lakukan secara nasional sejak tahun 2013. Program keluarga harapan (PKH) lebih di maksudkan untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Banggai merupakan salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat pra sejahtera atau masyarakat kelas ekonomi rendah. Program ini di realisasikan dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Banggai masih di temukan kendala-kendala umum dalam implementasinya seperti adanya oknum yang melakukan pungutan liar dengan mengatas namakan dinas-dinas terkait

dalam pemotongan dana, selain itu tenaga penyalur dari Program Keluarga Harapan masih minim sehingga dalam hal implementasi kepada masyarakat bekerja sama dengan PT. Pos Cabang Toili.

Penelitian Rustam (2018) tentang implementasi kebijakan mengemukakan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut lebih disebabkan adanya indikasi kualitas sumber daya implementor, terutama pada tingkat komunikasi berupa aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Program Keluarga Harapan (PKH) di arahkan untuk membantu masyarakat sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain itu untuk memberikan kemampuan kepada keluarga kurang mampu untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan merubah perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang relatif kurang mendukung kesejahteraan.

Kurang gizi di Kabupaten Banggai berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Sehingga tidak

masuk sekolah karna sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi di sekolah. Sebagaimana dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengeyam bangku sekolah karna harus membantu mencari nafkah.

Berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Banggai khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terutama pada rumah tangga sangat miskin perlu di tingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang di tujukan bagi keluarga miskin. Masih banyak rumah tangga sangat miskin yang tidak memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan di sebabkan oleh permasalahan yang terjadi, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah karena ketidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikan tidak penting. Demikian halnya dengan kesehatan, rumah tangga sangat miskin tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya pendapatan.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang di gunakan adalah dasar penelitian *grounded research*, Penelitian *grounded research* di kontruksikan agar peneliti dapat mengembangkan semua pengetahuan dan teori setelah mengetahui permasalahan dan data di lapangan. Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Analisis penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan tanpa implementasi suatu kebijakan tidak dapat berjalan, Kebijakan merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan keputusan tunggal tetapi terdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan rakyat banyak. Kebijakan publik di buat untuk merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat seperangkat tindakan itu terangkum dalam keputusan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yg terkait.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan publik substantif, kebijakan substantif merupakan kebijakan yang memberikan tekanan pada subject matter dari apa yang di butuhkan warga, jadi PKH di katakan sebagai kebijakan substantif karena PKH merespon masalah kemiskinan di kalangan masyarakat serta berupaya untuk menyejahterakan masyarakat miskin suatu daerah melalui bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Bantuan PKH memiliki tenggang waktu tertentu kepada keluarga sangat miskin, maka bantuan PKH harus di manfaatkan sebaik mungkin oleh peserta PKH untuk menyejahterakan keluarganya, secara umum pemberian pelayanan dapat terlihat melalui kegiatan pencairan dana PKH Kecamatan Toili Barat yang bertempat di kantor pos di Kecamatan Toili tim pendamping berperan penting dalam pencairan bantuan ini tidak terlepas dari kapasitas teknisnya dalam mengatur pencairan dana.

Di Kecamatan Toili Barat jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 187 orang yg terbagi menjadi 17 desa yang ada pada Kecamatan Toili Barat. Bantuan yang di terima berbeda-beda di setiap desa yang ada di Kecamatan Toili Barat, sistem

pembagian yang di tetapkan berdasarkan pada kreteria penerima. Artinya jika penerima tergolong Rumah Tanga Sangat Miskin maka jumlah Yang di terima sebesar Rp.625.000 sedangkan peserta PKH yang menerima paling sedikit khusus di berikan terhadap siswa yang melanjutkan sekolah ataupun ibu hamil dan menyusui. Oleh sebab itu diperlukan kecermatan khusus dalam pembagian dana bantuan. Serta sikap yang tegas dalam menghadapi masyarakat, agar masyarakat tersebut dapat mematuhi kebijakan PKH yang telah di tetapkan.

Komunikasi

Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah ataupun swasta, Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin di capai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik.

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan di perlukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka

mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab yang telah di bebaskan padanya. Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat di temukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat untuk kemudian berusaha menemukan alternatif dalam pemecahan masalah tersebut.

Sesuai keadaan yang ditemukan dilokasi penelitian itu bahwa sampai sekarang ini belum ada faktor penghambat yang berarti ketika pegawai atau aparat dalam mengimplementasikan kebijakan PKH karena penyampaian alur komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti yang nantinya akan mempermudah bagi pelaksanaan program dalam mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, dalam proses pelaksanaan kebijakan agar dalam proses pencapaian tujuan PKH dapat berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang jelas para pelaksana kebijakan sangat diharapkan untuk dapat bekerja berdasarkan bagian-bagian yang ditetapkan.

Sumberdaya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan. Sebelum

suatu kebijakan dirumuskan pembuat kebijakan harus bisa menentukan apakah kebijakan tersebut akan didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam keberhasilan implementasi PKH dilihat dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh implementor kebijakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas atau pun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

Kedua hal tersebut di atas harus diperhatikan dalam implementasi program kebijakan pemerintah. Sebab tanpa keseriusan pihak implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat seadanya. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*).

Kegagalan yang sering terjadi terdapat pada implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyesuaikan personal implementasi kebijakan, tetapi diperlukan suatu kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan,

Berbicara mengenai indikator sumber daya yang meliputi kemampuan dari para pelaksana kebijakan, sumber daya di posisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dan teransformasinya kedalam *output*. Sedangkan teknologis, sumber daya bertalian dengan teransformasi dari organisasi dalam perspektif ini harus ada pendelegasian wewenang dan pembagian tugas yang jelas untuk menciptakan koordinasi yang efektif dan maksimal. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi

implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan sangat di pengaruhi oleh adanya keterampilan, kompetensi dan kualitas dengan demikian yang dimaksudkan kualitas dalam artian adanya kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang di dapat dari pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, pegawai yang memiliki kompetensi dan kualitas personal akan mudah mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik dan tepat sasaran dari tujuan kebijakan itu sendiri.

Disposisi/Sikap

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang komplit dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan demikian disposisi menjadi salah satu hal yang terpenting dalam tercapainya implementasi kebijakan yang baik dan efektif.

Diposisi dikatakan sebagai kemauan/keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan

kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, Implementasi kebijakan bersifat kompleks serta adanya kerja sama dengan semua pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan yang baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Tujuan dari kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai dari publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang pabrik) maupun *public service* (jasa pabrik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan publik unntuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun nonfisik.

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan pemecahan masalah publik, kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan.

Demi tercapainya keberhasilan sebuah program maka sangat dibutuhkan sikap-sikap yang baik dan bertanggung jawab dari pelaksana kebijakan, disposisi yang artinya ialah sikap atau pengetahuan dari para pelaksana kebijakan, atau pengetahuan tersebut konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang baik.

Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang akan diterapkan.

Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dengan hubungan secara diagonal langsung organisasi dan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai masih kurang baik. Dalam hal pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) perlu meningkatkan pengawasan dilapangan serta adanya transparansi kepada masyarakat sehingga faktor komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, serta Struktur Organisasi dapat berjalan efektif sesuai apa yang diinginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016: 16. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia Bandung.
- Budi Winarno, 2002. *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik*

- (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak) *Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 2(1):67
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Perbandingan Administrasi Publik*. Penerbit Gava Media Yogyakarta,
- Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Trio RimbaPersada. Jakarta.
- M. Irfan Islamy, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta.
- Milles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*
- Moh.Nazir, 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Riant. D, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Koputindo.
- Rustam, Samsu A Sahibo, Pariyati, 2018, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Distribusi Air Guna Meningkatkan Produksi Padi Sawah Di Daerah Irigasi Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala*, jurnal kolaboratif sains, vol. 1 no. 1: oktober 2018
<https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.490>